

DAFTAR PUSTAKA

- Andarini, P. 2010. *Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan*. Semarang
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Jakarta.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final Pada UMKM*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, Mei, 2010. *Surat Edaran Nomor SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. 11 September 2016. www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=4.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013. *Lampiran 1 PER 32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari saha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 11 September 2016. ortax.org/files/downaturan/13PJ_PER32.pdf.
- Direktorat Jenderal Pajak, Juli, 2013. *PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu Adalah Untuk Keadilan*. 11 September 2016. <http://www.pajak.go.id/content/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan>.
- Faturochman. 1999. *Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi*. Buletin Psikologi Tahun VII No 1.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2001. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. 11 September 2016. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUPerpajakan.pdf>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2001. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1 Agustus 2017. www.pajak.go.id/sites/.../UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007 . *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto*. 11 September 2016. www.tarif.depkeu.go.id /Data/Regulation/01-03-07.pdf.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008. *Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: PT. Cipta Bina Parama.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas UndangUndang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama.

Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan, dan Relevansinya*. Yogyakarta: PT Kanisius Pustaka Filsafat.

Kharisma, Raditha, *et al.* 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. 11 September 2016. repository.un-ej.ac.id/.../Raditha%20Kharisma.pdf?...

Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2007. *PMK 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasila Neto*. 11 September 2016. www.tarif.depkeu.go.id / Data/Regulation/01-03-07.pdf.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Publisher

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015

Tambunan, R. 2013. *Ketentuan Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil*. 11. September 2013. <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>

Saikuddin, A. 2014. *Konsep Keadilan Dalam AL-QUR'AN (Telaah Kata Al-'adl dan Al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*.